[KARYA ILMIAH MAHASISWA PERJALANAN WISATA]

# PERAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA KELAWI, LAMPUNG SELATAN

**[1] Mazhela Hanum Faradilla,[2] Dian Puspita Sari, [2] Ali Murtopo**
[1] Mahasiswa Program Studi Agribisnis,[2] Dosen Program Studi Perjalanan Wisata
Politeknik Negeri Lampung
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 10 Rajabasa Bandarlampung
Telp (0721) 703995, Fax (0721) 787309

***ABSTRACT***

*The Tourism and Creative Economy Department of Lampung Province is one of the darrag tools that play a role in developing the tourism sector in Lampung Province. One of the areas with various tourism potentials in Lampung Province is Kelawi Village, Lampung Selatan. The Tourism and Creative Economy Department of Lampung Province uses community-based tourism development methods at the Minang Rua Beach and Pematang Sunrise attractions that pay attention to community participation. The writing of this final project aims to describe the roles and problems faced by the Tourism and Creative Economy Department of Lampung Province in developing community-based tourism at Kelawi Village. The data collection methods used were interviews and literature studies using the method of preparing qualitative descriptive reports. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation of The Lampung Tourism and Creative Economy Department. The results of the discussion show solutions that can be applied by the Tourism and Creative Economy Department of Lampung Province for the development of community-based tourism in Kelawi Village.*

***Keywords:*** *Role, Department of Tourism, Community-Based Tourism, Village.*

**ABSTRAK**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan salah satu perangkat darrag yang berperan untuk melakukan pembagunan dan pengembangan bidang pariwisata di Provinsi Lampung. Salah satu daerah dengan beragam potensi wisata di Provinsi Lampung adalah Desa Kelawi, Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggunakan metode pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada objek wisata Pantai Minang Rua dan Pematang Sunrise yang memperhatikan partisipasi masyarakat. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi. Metose pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur dengan menggunakan metode penyusunanan laporan deskriptif

kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Hasil pembahasan menunjukkan solusi yang dapat diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Desa Kelawi.

***Kata Kunci:*** Peran, Dinas Pariwisata, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Desa.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung merupakan salah satu perangkat daerah yang di atur pada peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dengan peran untuk melakukan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata. Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai bentuk perkembangan suatu daerah.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Salah satunya yaitu pada Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Sesuai dengan visi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, yaitu "Menjadikan Sektor Pariwisata Sebagai Sektor Andalan Perekonomian Dearah, Berkelanjutan dan Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Arti Luas", maka pembangunan kepariwisataan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat selaku subjek ataupun pelaku dalam pembangunannya.

Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan *Community Based Tourism* dimana masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam pembangunan pariwisata dan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan daya tarik wisata.

Dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kelawi, Bakauheni, Lampung Selatan terdapat peran serta pemerintah dalam peningkatan kualitas ilmu pengetahuan serta kesadaran masyarakat didalam bidang pengelolaan objek wisata. Oleh karena itu, tugas akhir ini dibuat agar dapat mengetahui masalah serta peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam menangani perkembangan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di Desa Kelawi sehingga dapat menuju kondisi ideal.

### Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mendeskripsikan peran serta

permasalahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi.

**Metode Pelaksanaan**

Laporan tugas akhir disusun dnegan lokasi penelitian pada kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Desa Kelawi dan lokasi penulisan di Polteknik Negeri Lampung pada tanggal 19 September 2021 sampai dengan 27 Juli 2022.

**Metode Analisis Data**

Data tugas akhir adalah data primer yang diperoleh berdasar hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh berdasar studi literatur dan dokumentasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan menggunakan metode penyusunan deskriptif kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Kelawi berada di Kceamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Desa Kelawi menjadi Desa Definitif pada tanggal 29 April 2000 dengan luas gerografis 1.995,5 Ha dan luas daerah sebesar 9,24 km$^2$ atau 16,70% dari presentase luas kecamatan (Kagungan, D, Rosalia dan Zainal. 2021). Desa Kelawi terdiri atas 9 dusun dengan peta sebagai berikut.

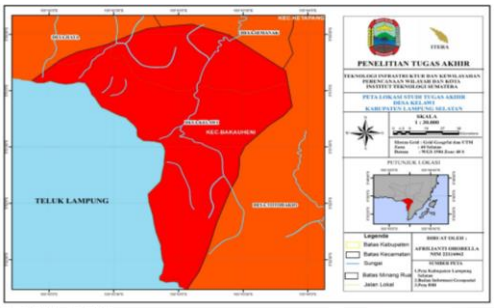


Gambar 1. Peta Administrasi Desa Kelawi

Sumber: https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2106050005/22116062_5_154512.pdf

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kawasan strategis pusat wisata di Provinsi Lampung, didukung oleh perencanaan wilayah dan merupakan pusat pintu masuk Lampung, pelabuhan Bakauheni dengan berbagai wisata bahari yang dapat dikunjungi wisatawan.

Pantai Minang Rua telah beroperasi sejak 2016 dengan daya tarik pemandangan pantai, lokasi *camping*, *spot diving*, penangkaran anak penyu atau 'tukik' dan *Green Canyon*. Sedangkan Pematang Sunrise memiliki daya tarik pemandangan selat sunda dari atas perbukitan dengan bentang alam Pelabuhan Bakauheni.

Gambar 2. Pantai Minang Rua Bahari
(Sumber: https://jadesta.kemenparekraf.go.id/)

Gambar 3. Pematang Sunrise
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Kedua objek wisata tersebut dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Minang Rua Bahari ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor B/612.A/III.16/HK/13/20-09-13 yang dibentuk pada tanggal 16 September 2013 namun baru aktif pada tahun 2016 dengan total 57 anggota.

Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi diklasifikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blakely (dalam Medy, R. 2018) antara lain koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator dengan rincian sebagai berikut:

**Koordinator**

Proses penyelenggaraan pariwisata Desa Kelawi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dikoordinir dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan dibawah naungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung selaku wisata unggulan daerah meliputi berbagai tahapan sebagai berikut:

a) Pembentukan Pokdarwis Minang Rua Bahari pada tahun 2013.
b) Penyuluhan sadar wisata kepada pengelola, masyarakat, termasuk aparatur atau pejabat desa.
c) Pelatihan tata kelola dengan mendatangkan narasumber dibidangnya.
d) Pelatihan *public speaking*, pemandu wisata, penjaga pantai (tirta), dan ekonomi kreatif pada 2019.
e) *Workshop* dan pendampingan bekerjasama dengan berbagai dinas lainnya sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, seperti Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan keterampilan ekonomi kretaif, Dinas Perhubungan Umum untuk perbaikan akses jalan, dan Kominfo untuk penyuluhan penggunaan media sosial sebagai alat promosi.

Melalui program tersebut, masyarakat sekitar melihat hal ini menjadi suatu hal positif untuk peningkatan lapangan kerja sehingga pengembangan pariwisata.

Gambar 4. Penyuluhan dan Bimbingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan Kepada Pokdarwis Minang Rua

Sumber: https://www.instagram.com/dinaspariwisata.lampungselatan/

**Fasilitator**

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas seperti sarana prasarana bagi objek wisata. Dinas Pariwisata terlibat dalam pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Beberapa program yang telah dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai fasilitator yaitu:

a) Mendorong keikutsertaan Desa Kelawi (Minang Rua dan Pematang Sunrise) dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 dan pendaftaran pada aplikasi Jejaring Desa Wisata (Jadesta).
b) Pemberian bantuan dana hibah berupa fasilitas pendukung pariwisata pada tahun 2017 berupa alat kebersihan dan papan himbauan (reklame) serta pada tahun 2019 berupa alat pendukung wisata *undersea* dengan rincian barang sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Barang Penyediaan Fasilitas Pariwisata

| No. | Nama Barang | Jumlah Barang |
|---|---|---|
| 1. | Life Jacket | 16 Unit |
| 2. | Megaphone | 4 Unit |
| 3. | Payung besar pantai warna warni | 10 Unit |
| 4. | Kotak sampah | 4 Unit |
| 5. | Hammock | 10 Unit |
| 6. | Alat cuci tangan | 2 Unit |
| 7. | Kinjar atau tenggok bambu | 20 Unit |
| 8. | Cangkul | 20 Unit |
| 9. | Tampah | 20 Unit |
| 10. | Gunting Ranting | 20 Unit |
| 11. | Sepatu boot krt | 20 Unit |
| 12. | Sabit atau arit | 20 Unit |
| 13. | Alat cuci tangan | 2 Unit |
| 14. | Sarung tangan | 20 Pasang |

Sumber: Data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, 2021.

Penyerahan bantuan ini langsung diberikan kepada pihak Pokdarwis Minang Rua Bahari. Pokdarwis Minang Rua juga selanjutnya menyampaikan berbagai hal yang masih diperlukan sebagai sarana prasarana pendukung pariwisata diantaranya perlengkapan P3K, *Ring Buoy* (Pelampung roda atau cincin) dan tandu yang selanjutnya permintaan ini ditanggapi melalui permohonan dana kepada pihak ketiga (PT.BPD Lampung) di tahun 2021.

Gambar 5. Penyerahan Bantuan Fasilitas Wisata
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021.

**Stimulator**

Dalam hal ini, stimulus diartikan sebagai bentuk penciptaan strategi untuk membangun atraksi dengan masyarakat.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melakukan sosialisasi pemberdayaan objek wisata pada tahun 2017 dan sosialisasi 'Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Tata Kelola Objek Wisata' pada 02 Desember 2021 dengan melibatkan Pokdarwis Minang Rua Bahari dan Pematang Sunrise serta masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam pengembangan objek wisata. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung berharap melalui sosialisasi tersebut masyarakat dapat paham terkait managemen objek wisata serta kelompok organisasi sehingga kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan efektif. Kegiatan ini merupakan program tahunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, sehingga dimungkinkan adanya sosialisasi yang akan dilaksanakan di Desa Kelawi di waktu mendatang.

Gambar 6. Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Tata Kelola Objek Wisata
Sumber: Dokumentasi Pribasi, 2021.

Selain itu, melalui narasumber yang mengikuti kegitaa yaitu M. Syaifullah, S.Pd. sebagai penggiat pariwisata memberikan strategi pengembangan potensi wisata melalui pembuatan paket wisata yang melibatkan permainan tradisional serta memberikan saran pengelolaan wisata mengingat faktor pendukung dan penghambat yang ada terhadap objek wisata di Desa Kelawi.

**Motivator**

Dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah sebagai faktor pendorong sangat diperlukan untuk menopang keberlangsungan bisnis pariwisata. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung melakukan pengadaan kunjungan yang bersifat persuasif. Dinas Pariwisata mengudang perwakilan Pokdarwis untuk melakukan kunjungan beriupa diskusi agar terjalin hubungan yang baik dan kesepahaman komunikasi dalam pengembagan pariwisata. Dinas Pariwisata melakukan komunikasi secara

langsung kepada perwakilan Pokdarwis Minang Rua selaku pengelola objek wisata untuk memberian kesempatan pengembangan sejalan dengan tujuan bersama agar dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung juga memverikan seragam berupa kaos berlambang 'Pesona Indonesia' sebagai bentuk dukungan agar Pokdarwis an datang dapat terus bersemabangan mengembagkan objek wisata di Desa Kelawi, Lampung Selatan. Perwakilan Pokdarwis pun menyambut baik hal ini dengan datang ke kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk menanggapi undangan yang telah diberikan.

Gambar 7. Kunjungan Pokdarwis Minang Rua ke Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021.

Untuk melakukan pendekatan komunitas ini akan digunakan pemahaman mengenai pengembangan masyarakat atau *community development* yang lebih memfokuskan diri pada pengembangan kehidupan ekonomi, prasarana fisik (Dunham (dalam Adi, 2017).

Dalam melakukan pengembangan pariwisat terdapat beberapa hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam proses yang berjalan. Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi berdasar hasil wawancara yang telah dilakukan diantaranya:

a) Pemberian dana hibah yang memerlukan waktu dikarenan proses administrasi dan birokrasi.
b) Beberapa fasilitas yang diberikan belum dimanfaatkan dengan efektif.
c) Kesadaran masyarakat yang masih minim akan pariwisata.
d) Kegiatan pariwisata dan desa belum selaras, terutama terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa.
e) Bencana alam yang terjadi hampir setiap tahun yaitu banjir rob, tsunami, dan gempa yang menghancurkan berbagai fasilitas wisata yang telah dibangun.
f) Managemen kelompok, khususnya terkiat tata kelola pembagian hasil dan keuangan yang dinilai kurang baik dan teroganisir

Berdasarkan permasalahan diatas diperlukan berjalannya pendekatan pariwisata berbasis masyarakat dengan efektif sesuai yang dianjurkan oleh Yaman dan Mohd (2004) yaitu perlu adanya dukungan pemerintah sebagai badan penasehat di bidang penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan

sebagai koordinator untuk memberikan usulan pembagian hasil yang adil agar dapat diterima oleh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan pariwisata yang berjalan.

Untuk meminimalisir permasalahan anggaran yang ada, peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung diperlukan sebagai koordinator dalam pengembangan kepariwisataan, termasuk penyuluhan atau pemberian informasi terkait sistem pengelolaan pariwisata. Pembagian pendapatan dalam kegiatan kepariwisataan dapat dilakukan pembagian keuntungan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar sistem managemen dan keuangan dapat berjalan transparan dan terbuka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak.

Hal ini dikarenakan dalam pengembangan pariwisata, desa ikut berperan dalam mengembangkan pariwisata seperti melalui perbaikan akses jalan dan menambah fasilitas pendukung wisata Pantai Minang Rua. Contoh skema sistem pembagian pendapatan sebagai berikut:

Gambar 8. Contoh Skema Pembagian Penghasilan

Terkait kualitas sumberdaya manusia, masyarakat sebagai pelaku utama kepariwisataan perlu meningkatkan kesadaran akan pengelolaan objek wisata. Dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi hal utama yang perlu diperhatikan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kelompok sadar wisata Minang Rua Bahari bersama Pematang Sunrise terus melakukan rapat koordinasi sebulan sekali untuk membahas masalah yang perlu diperbaiki dan dievaluasi, Untuk itu, berdasarkan keputusan bersama ditetapkan jadwal kehadiran bagi angota Pokdarwis dengan tugas dan unit kegiatan tertentu seperti Gambar 9.

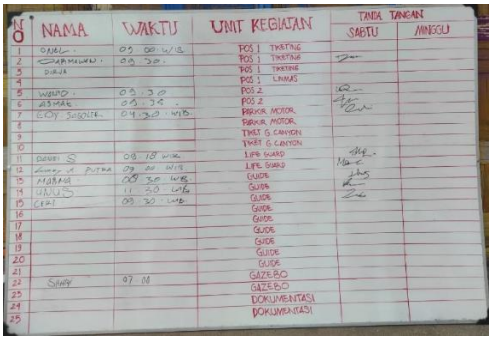


Gambar 9. Jadwal Kehadiran Anggota Kelompok Sadar Wisata Minang Rua 4 Juni 2022

Sumber: Dokumentasi Pribadi. 2022

Permasalahan lain mengenai pemanfaatan fasilitas serta perawatan pasca program masih kerap terjadi, seperti alat cuci tangan pada Gambar 10 yang tidak digunakan sebab belum adanya sumber air yang dapat dipakai

serta reklame yang using sebab angin pantai dari waktu ke waktu. Hal ini dapat diminimalisir melalui kunjungan atau perawatan rutin dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung secara berkala. Dengan menjalin hubungan yang baik antar pihak, maka akan melahirkan kesepahaman akan tujuan yang ingin dibangun kedepannya. Untuk itu, kedepannya diharapkan berbagai pihak dapat saling terbuka untuk dapat mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi.

Gambar 10. Fasilitas Pariwisata Desa Kelawi Tidak Terpakai

Sumber: Dokumentasi Pribadi. 2022.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi, khususnya Pantai Minang Rua dan Pematang Sunrise diklasifikasikan menjadi koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. (a) Sebagai koordinator, berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan pengembangan pariwisata dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembagian hingga evaluasi. (b) Sebagai fasilitator, memfasilitasi keikutsertaan dalam ajang ADWI 2022 dan memberikan bantuan dana hibah pariwisata. (c) Sebagai stimulator, melakukan sosialisasi dan strategi pengembangan potensi wisata. (d) Sebagai motivator, memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada Pokdarwis dan masyarakat dalam melakukan pengembangan kegiatan pariwisata.
2. Permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi antara lain: (a) Proses pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung belum melibatkan kontribusi perangkat desa kurang maksimal dalam kegiatan. (b) Fasilitas serta sarana prasarana tidak terawat dan digunakan dengan baik. (c) Proses pencairan untuk birokrasi pemberian dana hibah yang memerlukan waktu cukup lama. (d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan aktivitas pariwisata yang dijalankan.

**Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peningkatan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi antara lain:

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dapat memaksimalkan perannya dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kelawi melalui kunjungan kerja rutin agar dapat menjalin komunikasi dan ikatan dengan baik kepada Pokdarwis selaku pengelola wisata.
2. Permasalahan yang tertera dapat diatasi melalui beberapa solusi diantaranya: (a) Memaksimalkan BUMDes yang diarahkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung sebagai koordinator untuk menentukan pembagian pendapatan pariwisata di Desa Kelawi. (b) Memaksimalkan peran Pokdarwis Minang Rua Bahari dan Pematang Sunrise dalam pengelolaan dan perawatan fasilitas kepariwisataan agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal program. (c) Memaksimalkan percepatan waktu pencairan dana hibah oleh pihak ketiga (PT.BPD) sesuai kebutuhan dan urgensi dari objek wisata pariwisata agar dapat berkembang dengan efektif. (d) Melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar sebagai sumberdaya manusia kepariwisataan untuk menimbulkan kesadaran dan dapat berkomitmen memajukan potensi pariwisata Desa Kelawi.

**Referensi**

Adi, I.R. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.

Gubernur Lampung. 2019. *Peraturan Gubernur Lampung No 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.*

Kagungan, D., Rosalia, F., & Zainal, A. G. (2021). Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Tsunami Bagi Kelompok Sadar Wisata Minang Rua Bahari Sebagai Kearifan Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Bangkit Menuju Kemandirian. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *1*(2), 57–61. Universitas Lampung.

Medi, R. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake Di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1–12.

Yaman dan Mohd. 2004. *Community based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia. Journal of Applied Sciences* IV (4), 2004:583-589.

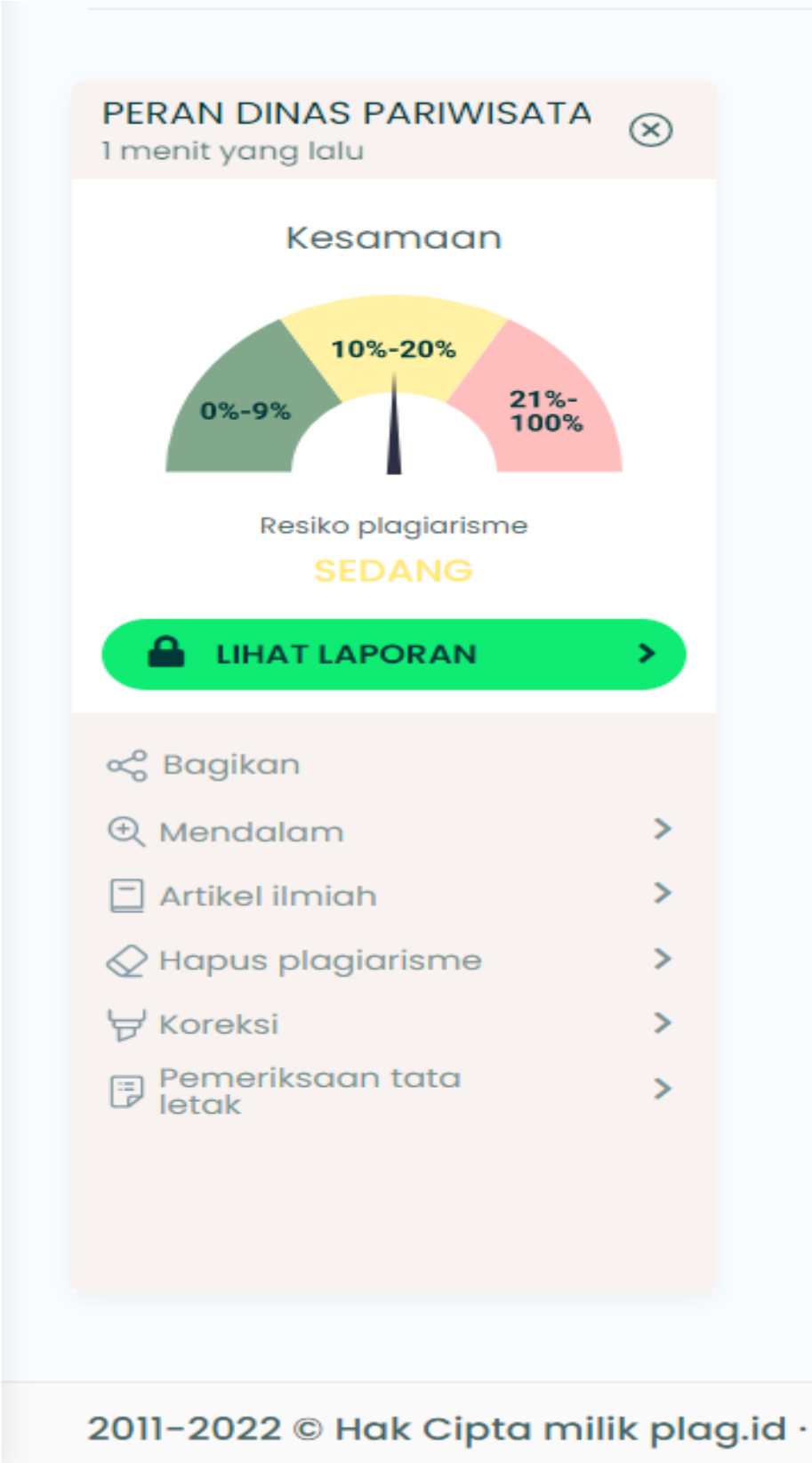
PERAN DINAS PARIWISATA
1 menit yang lalu
Kesamaan
10%-20%
0%-9%
21%-100%
Resiko plagiarisme
SEDANG
LIHAT LAPORAN
Bagikan
Mendalam
Artikel ilmiah
Hapus plagiarisme
Koreksi
Pemeriksaan tata letak
2011-2022 © Hak Cipta milik plag.id